PENGHILANGAN HAK KEWARGANEGARAAN BAGI EKS ISIS

Samsul Arifin¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, email: aricalapola@gmail.com

ABSTRAK

Asia tenggara menjadi salah satu objek penyebaran ideologi ISIS khususnya Indonesia dan Malaysia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Adanya persamaan rasa nasib dan keyakinan bahwa tiada sistem tatanan negara dan pemerintahan yang baik kecuali sistem khilafah, hal ini mendorong mereka untuk bergabung didalamnya. Dibalik berita tewasnya pemimpin kelompok tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana nasib WNI yang tergabung didalamnya. Adanya statement dari presiden Jokowi bahwa secara pribadi beliau tidak akan memulangkan mereka, hal ini mendapat respon yang sama dari masyarakat yang beranggapan bahwa mantan kelompok ISIS jika dipulangkan ke Indonesia akan menjadi teroris. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis dampak hukum terhadap mereka yang bergabung dengan ISIS, apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah, apakah mereka akan kehilangan kewarganegaraan, serta bagaimana hukum positif mengaturnya. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (statute approach) pendekatan ini beranjak dari hukum positif baik yang bersifat nasional maupun internasional, vertikal maupun horizontal. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dampak hukum dan kejelasan mengenai hak kewarganegaraan bagi mereka yang bergabung dengan ISIS.

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Hak Kewarganegaraan;
ISIS; Penghilangan

Cite this paper:

Arifin, S., 2020.
Penghilangan Hak
Kewarganegaraan Bagi
Eks Isis. *Widya
Yuridika: Jurnal Hukum*,
3(1).

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki undang-undang nomor 12 tahun 2006 sebagai salah satu produk hukum positif yang mengatur mengenai kewarganegaraan, serta adanya perturan pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2007 sebagai pelaksanaanya, termasuk didalamnya mengatur mengenai mekanisme perolehan, penghilangan, dan pencabutan hak kewarganegaraan. Dewasa ini banyak pemberitaan yang mengabarkan bahwa pemimpin militan ISIS telah meninggal dunia dengan cara meledakkan bom rompi yang melekat pada tubuhnya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan presiden amerika serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa pembunuhan terhadap pemimpin ekstrimis itu merupakan salah satu prioritas dalam masa kepemimpinannya. Pasukan AS melakukan tes

DNA terhadap jasad Baghdadi tersebut, hal ini dilakukan untuk menguji kebenaran bahwa yang meninggal benar-benar pemimpin ISIS tersebut¹.

Peristiwa lain yang menjadi perhatian dunia adalah bagaimana nasib para pengikut ISIS tersebut, yang merupakan warga dari beberapa negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Hal ini mengundang kontroversi di kalangan masyarakat, karena tidak bisa dipungkiri bahwa begitu banyaknya warga negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok ekstrimis tersebut. Data terakhir yang diberitakan oleh pemerintah menunjukkan bahwa kurang lebih ada sekitar 699 WNI yang bergabung dengan ISIS tersebut termasuk anak-anak yang masih di bawah 10 tahun². Begitu mudahnya penyebaran paham ideologi ISIS sehingga mampu untuk menarik perhatian masyarakat dunia khususnya negara-negara Asia Tenggara yang penduduknya mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Adanya keyakinan bahwa tidak ada sistem kenegaraan yang benar kecuali negara yang berbentuk khalifah, menjadi satu dari beberapa faktor yang mendorong WNI untuk bergabung dengan kelompok tersebut³.

Ada berbagai hal yang mempengaruhi masyarakat Asia Tenggara sehingga dengan mudahnya dapat menerima dan memahami paham radikal tersebut. Faktor utamanya adalah karena adanya suatu pandangan teologis dan keimanan yang memiliki kesamaan dengan ISIS, sebagian umat Muslim beranggapan adanya keterkaitan yang erat antara misi ISIS dengan kepercayaan dalam agama Islam bahwa pada akhirnya akan berdiri suatu "*khilafah ala minhaj nubuwwah*" atau kekhalifahan Islam. Hal ini sejalan dengan runtuhnya pemerintahan yang otoriter di Jazirah Arab. Faktor kedua, ISIS disini yang menyatakan diri sebagai pelopor berdirinya khilafah menyerukan sektarianisme (diskriminasi atau kebencian) terhadap golongan syi'ah, pihak ISIS sendiri beranggapan bahwa kondisi negara di Asia Tenggara sangat mendukung terhadap politik sektarianisme tersebut. Hal ini dapat terlihat atas pelarangan kelompok syi'ah di Malaysia, sementara di Indonesia sendiri keberadaannya tidak diakui. Dan faktor ketiga adalah, timbulnya rasa simpati dan perasaan senasib di kalangan umat Muslim Asia Tenggara terhadap umat Muslim di Suriah yang kemudian mendorong umat Muslim Asia Tenggara untuk berangkat melakukan jihad atas nama suatu misi kemanusiaan dan merasa bahwa hal tersebut merupakan panggilan suci agama⁴.

Dalam hal tindakan apa yang akan diambil oleh pemerintah terhadap WNI yang bergabung dengan kelompok tersebut, seperti yang disampaikan oleh bapak Presiden Jokowi bahwa^{6*}

jika ditanya secara pribadi, beliau tidak akan memulangkan mereka ke Indonesia, hal ini disampaikan karena jika melihat data peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa pelakunya adalah mereka para mantan anggota kelompok ekstrimis tersebut. Tentu hal ini harus melalui musyawarah antar pimpinan lembaga pemerintahan. Mempertimbangkan dengan bijak dan menghitung dampak positif/negatif jika para eks

¹ Ani Nursalikhah. "Nasib ISIS, apakah bubar pascakematian Baghdadi?" (<https://republika.co.id/berita/q04vvm318/nasib-isis-akankah-bubar-pascakematian-baghdadi>, oktober 2019)

² Andri Saubani. "Pemerintah terus validasi jumlah WNI yang pernah gabung ISIS" (<https://republika.co.id/berita/q6f0sm409/pemerintah-terus-validasi-jumlah-wni-yang-pernah-gabung-isis>, februari 2020)

³ Fajar Purwawidada, "Jaringan baru terorisme solo" (Jakarta, PT Gramedia, 2014)

⁴ Najamuddin, Khoirur Rijal, "Eksistensi dan perkembangan ISIS: dari Irak hingga Indonesia", jurnal ilmiah hubungan internasional vol. 13, 2017, hal 51-52

militan ISIS tersebut di pulangkan ke indonesia. dalam melakukan pertimbangan, ada beberapa aspek yang harus menjadi titik utama mulai dari aspek kemanusiaan, keamanan, dan aspek hukumnya. Serta upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan deradikalisasi karena sampai sekarang dirasa masih kurang optimal dan menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah kedepannya jika para eks militan ISIS tersebut benar-benar dipulangkan ke indonesia⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perolehan Dokumen Keimigrasian Dan Keberangkatan

Perempuan dan anak-anak merupakan kaum yang rentan terhadap tindak pidana menjadi sasaran utama dalam pendirian kelompok terorisme ini, sesuai dengan pemberitaan ISIS yang menyebutkan bahwa anak-anak merupakan bagian dari kekhalifahan dan perempuan dipandang sebagai garda depan generasi penerus⁶. Untuk menghindari pencekalan pada saat pemberangkatan, maka yang menjadi negara tujuan adalah turki yang notabene dekat dengan suriah. data dari Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal, menyebutkan ada sekitar 430 WNI yang dipulangkan dari Turki karena diduga terlibat aksi terorisme dengan bermacam-macam latar belakangnya. Ada sebagian yang sudah berhasil masuk ke Suriah, ada yang sedang berupaya menyeberang dari Turki ke Suriah, dan ada pula yang baru tiba di Turki⁷.

Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan bahwa bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah merubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang begitu besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dilakukan semata demi terlaksananya kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia untuk keluar/masuk wilayah Indonesia.

Dikalangan kancah internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional. Indonesia menjadi salah satu peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain seperti konvensi perserikatan bangsa-bangsa melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi, dan telah diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.

Poin penting dalam pengaturan keimigrasian yang terdapat dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 telah mencakup mulai dari hak dan kewajiban baik itu WNI maupun WNA. Pasal 67 memberikan penjelasan mengenai Pengawasan keimigrasian berupa

⁵ Youtube. (2020, februari,06), "*jokowi ogah pulangkan eks ISIS ke Indonesia*". Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=z11Ub7tSrK4>

⁶ Diah ratna, meta novia, "begini penjelasan, anak dan ibu terlibat aksi terorisme" (<https://www.jawapos.com/internasional/18/05/2018/begini-penjelasan-anak-dan-ibu-terlibat-aksi-terorisme/>, jawapos, mei 2018)

⁷ Riva dessthania suastha, "*anak Indonesia ditangkap bersama terduga ISIS di turki*", (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170707200159-134-226427/anak-indonesia-ditangkap-bersama-terduga-isis-di-turki>, CNN, juli 2017)

pengawasan administratif dan pengawasan di lapangan, karena kedua hal tersebut menjadi sangat fundamental dalam hal menjaga keamanan dan proses perolehan dokumen keimigrasian. Dalam rangka pengawasannya, maka dibentuklah tim pengawasan khusus terutama bagi WNA, didalamnya melibatkan instansi terkait, menteri pejabat imigrasi, dan tak lupa koordinasi dengan kepolisian⁸.

2. Hilangnya Hak Kewarganegaraan

Penghilangan hak kewarganegaraan oleh suatu Negara merupakan tindakan yang tidak serta merta dilakukan begitu saja, prinsip perlindungan HAM menjadi hal yang sangat fundamental dalam mengambil keputusan tersebut. Karena HAM memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan nilai-nilai kemanusiaan (*humanistis*), maka penghilangan kewarganegaraan yang berorientasi pada perlindungan HAM dapat dipahami sebagai tindakan pada ide individualisasi pidana. Serta dianutnya asas *culpabilitas* menjadi suatu konsep bahwa tidaklah manusiawi jika penjatuhan pidana diberikan terhadap orang yang tidak bersalah⁹.

Pengaturan mengenai penghilangan hak kewarganegaraan terdapat dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Disebutkan dalam pasal 23 bahwa warga negara indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya atas beberapa hal mulai dari (orang) yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain, masuk dinas tentara asing, masuk dinas negara asing, bersumpah setia terhadap negara asing, ikut serta pemilu negara asing, dan beberapa hal lainnya yang disebutkan dalam BAB IV undang-undang tersebut. Bahwa tidak ada poin dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa seseorang akan kehilangan kewarganegaraannya sebagai WNI karena telah membakar paspor atau bergabung dengan kelompok terorisme tersebut. Disatu sisi Perlu kita pahami bersama bahwa upaya untuk mendirikan negara/pemerintahan di wilayah suatu negara dengan cara melakukan teror dan memberontak memposisikan status hukum ISIS sebagai *belligerent*. Hal ini menjadikan ISIS sebagai suatu subjek hukum internasional sebagai *belligerent*, bukan suatu negara yang kedaulatannya diakui dan melakukan diplomasi dengan negara lain. Meskipun disatu sisi perlu adanya pengakuan dari negara terkait yakni irak dan suriah dan memperlakukannya sebagai tawanan perang, bukan penjahat¹⁰.

3. Mekanisme penghilangan Kewarganegaraan

Presiden Jokowi secara pribadi akan menolak dan tidak akan memulangkan kembali para WNI yang terlibat ISIS, lain halnya jika keputusan musyawarah para pimpinan negara berbeda dan menyetujui pemulangan tersebut. mengenai mekanisme penghilangan kewarganegaraan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan republik indonesia. disebutkan dalam pasal 32, ada garis koordinasi masing masing. WNI yang diduga memenuhi salah satu unsur yang terdapat dalam pasal 31 dan diketahui oleh pimpinan instansi tingkat pusat, maka berkoordinasi

⁸ Gindo Ginting dkk, "pendeportasian orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian" jurnal hukum universitas syiah kuala, vol 2, 2014, hal 63

⁹ Barda nawawi arif, "masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan" (Jakarta, kencana preadamedia group, 2014, hal 56-58)

¹⁰ Miftahus sholehudin, "ISIS, pemberontak, dan teroris dalam hukum internasional" research repository universitas negeri maulana malik Ibrahim, vol 10, 2015, hal 6

dengan menteri, jika yang mengetahui pimpinan tingkat daerah, maka melaporkannya ke pejabat, dan jika yang mengetahui masyarakat sipil (yang bertempat tinggal diluar wilayah indonesia), maka melaporkannya kepada perwakilan (kedutaan) indonesia dinegara tersebut.

Hasil koordinasi dan laporan tersebut akan di cek kembali kebenarannya oleh menteri, dan mengklarifikasi langsung kepada pelapor, terlapor, dan instansi terkait. jika hasil klarifikasi sesuai dengan isi laporan dan isi BAB IV undang-undang nomor 12 tahun 2006, maka Menteri akan menetapkan (ketetapan menteri) tentang nama-nama orang yang kehilangan kewarganegaraannya tersebut dan tembusannya disampaikan kepada presiden, pejabat yang wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal yang bersangkutan (asal/tempat tinggalnya di indonesia), perwakilan (kedutaan) indonesia di negara yang menjadi tempat tinggal yang bersangkutan, dan instansi terkait (pasal 34). Selanjutnya menteri akan mengumumkan nama-nama orang yang kehilangan kewarganegaraannya dalam berita negara republik indonesia (pasal 39).

PENUTUP

Adanya indikasi kecurangan oleh pelaku pada saat mengurus perolehan dokumen keimigrasian serta kelalaian oleh pihak imigrasi menjadi beberapa faktor yang membuat para pelaku yang berkeinginan bergabung dengan ISIS dapat dengan mudah berangkat ke turki. Selanjutnya mengenai penghilangan hak kewarganegaraan, bahwa sesuai dengan isi dari BAB IV undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, tidak ada satu alasan yang menyebabkan para WNI yang bergabung dengan ISIS tersebut akan kehilangan kewarganegaraannya. Meskipun sudah bersumpah setia kepada ISIS dan membakar paspornya (paspor negara republik indonesia), itu tidak menjadikannya kehilangan hak kewarganegaraan sebagai WNI, mengingat posisi ISIS disini hanya sebagai *belligerent*, bukan suatu negara yang kedaulatannya diakui oleh sehingga diperbolehkan melaksanakan diplomasi dengan negara lain.

Mengenai mekanisme kehilangan kewarganegaraan diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan diperjelas dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan republik indonesia. perlunya klarifikasi langsung oleh menteri kepada pihak yang terlapor, menjadikannya sebagai satu hambatan dalam pelaksanaan penghilangan kewarganegaraan tersebut. tidaklah mudah bagi menteri (yang mewakili) untuk bertemu langsung ataupun menghubunginya melalui telepon dengan pihak terlapor, mengingat ancaman keselamatan pada saat berkunjung untuk melakukan klarifikasi dan batasan akses terhadap telepon dan internet yang dibuat oleh ISIS, karena sampai pada saat tulisan ini dibuat suriah masih dalam kondisi yang tidak aman pasca berita atas kematian pemimpin ISIS. meskipun posisi WNI sudah dalam camp pengungsian, hal ini tetap akan menjadi kekhawatiran kedepannya jika terjadi hal serupa. maka perlu adanya penyederhanaan tata-cara klarifikasi tersebut, bisa saja pembuktian kebenaran atas laporan itu cukup diklarifikasi kepada pelapor dan perwakilan (kedutaan) indonesia di suriah.

DAFTAR PUSTAKA

Books

Barda, n. a., 2014. *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

FAJAR, P., 2014. *jaringan baru teroris solo*. jakarta: PT gramedia.

Marzuki, P. M., 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Jurnal

Gindo Ginting dkk, 2014. Pendeportasian Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4 november, Volume II, p. 63.

Najamuddin , K. R., 2017. eksistensi dan perkembangan ISIS: dari irak hingga indonesia. *jurnal ilmiah hubungan internasional*, Volume 13, pp. 51-52.

Sholehudin, M., 2015. ISIS, Pemberontak, dan Teroris Dalam Hukum Internasional. *research repository (univeritas islam negeri maulana malik ibrahim)*, Volume 10, p. 6.

Media Massa

andri, s., 2020. *Pemerintah Terus Validasi Jumlah WNI yang Pernah Gabung ISIS*. [Online] Available at: <https://republika.co.id/berita/q6f0sm409/pemerintah-terus-validasi-jumlah-wni-yang-pernah-gabung-isis> [Diakses 28 februari 2020].

ani, n., 2019. *Nasib ISIS, Akankah Bubar Pascakematian Baghdadi?*. [Online] Available at: <https://republika.co.id/berita/q04vvm318/nasib-isis-akankah-bubar-pascakematian-baghdadi> [Diakses 30 oktober 2019].

Anon., 2020. *Jokowi Ogah Pulangkan WNI Eks ISIS ke Indonesia...*, jakarta: dikutip dari youtube, KompasTV.

diah ratna, m. n., 2018. *Begini Penjelasan, Anak dan Ibu Terlibat Aksi Terorisme*. [Online] Available at: <https://www.jawapos.com/internasional/18/05/2018/begini-penjelasan-anak-dan-ibu-terlibat-aksi-terorisme/>

Riva Dessthania Suastha, 2017. *Anak Indonesia Ditangkap Bersama Terduga ISIS di Turki*. [Online] Available at: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170707200159-134-226427/anak-indonesia-ditangkap-bersama-terduga-isis-di-turki>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan

Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan republik indonesia

Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme

Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak